

**ANALISIS INSTITUSIONALISME BARU TERHADAP KHILAFATUL
MUSLIMIN DAN SIKAP ANGGOTA MENGENAI DEMOKRASI
(STUDI DI PROVINSI LAMPUNG)**

Tesis

Oleh

**GEDE ARI PRATAMA PUTRA
NPM 2126021001**



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS INSTITUSIONALISME BARU TERHADAP KHILAFATUL MUSLIMIN DAN SIKAP ANGGOTA MENGENAI DEMOKRASI (STUDI DI PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

GEDE ARI PRATAMA PUTRA

Indonesia merupakan negara demokrasi, namun di dalamnya berkembang organisasi yang menolak sistem tersebut dan mengusung konsep khilafah, salah satunya adalah Khilafatul Muslimin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Khilafatul Muslimin menggunakan pendekatan teori Institusionalisme Baru (historis, pilihan rasional, sosiologis, konstruktivis, dan jaringan), serta menganalisis sikap anggotanya terhadap demokrasi melalui teori Budaya Politik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur terhadap tokoh dan anggota Khilafatul Muslimin, pejabat Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, serta pengamat radikalisme; observasi non-partisipatif terhadap aktivitas organisasi di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan; dokumentasi atas peristiwa-peristiwa yang melibatkan Khilafatul Muslimin; serta studi pustaka dari dokumen internal dan literatur ilmiah relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara historis, Khilafatul Muslimin dibentuk melalui Ma'lumat dan figur sentral sebagai sumber legitimasi; (2) secara pilihan rasional, organisasi bersikap adaptif terhadap sistem demokrasi, tanpa konfrontasi langsung; (3) secara sosiologis, identitas kolektif dibentuk melalui simbol, tradisi, dan norma internal; (4) secara konstruktivis, narasi ideologis yang dikembangkan menciptakan konstruksi sosial alternatif berbasis khilafah; dan (5) secara jaringan, struktur organisasi mendukung koordinasi nilai serta penguatan kontrol ideologis lintas wilayah. Adapun sikap anggota terhadap politik elektoral cenderung pasif dan apatis, berlandaskan keyakinan bahwa kekuasaan berasal dari Allah, meski tetap berada dalam kerangka hukum negara demokrasi.

Kata Kunci: Khilafatul Muslimin, demokrasi, institusionalisme

ABSTRACT**AN ANALYSIS OF NEW INSTITUTIONALISM ON KHILAFATUL MUSLIMIN AND MEMBERS' ATTITUDES REGARDING DEMOCRACY (A STUDY IN LAMPUNG PROVINCE)****By****GEDE ARI PRATAMA PUTRA**

Indonesia is a democratic country, yet within it exists an organization that ideologically rejects democracy and promotes the concept of a caliphate—Khilafatul Muslimin. This study analyzes the organization through the lens of New Institutionalism (historical, rational choice, sociological, constructivist, and network) and examines its members' attitudes toward democracy using Political Culture theory.

The research employs a qualitative method with data collected through semi-structured interviews with Khilafatul Muslimin members and leaders, Kesbangpol officials, and radicalism observers; non-participant observation of the group's activities in Bandar Lampung and South Lampung; documentation of relevant events; and literature review of internal and academic sources.

The findings reveal that: (1) historically, the organization was established through a Ma'lūmat and central figure; (2) rationally, it shows adaptive behavior without direct confrontation; (3) sociologically, identity is built through internal norms and symbols; (4) constructively, it forms an alternative social reality based on caliphate narratives; and (5) organizationally, it coordinates values and controls ideology through regional networks. Members' attitudes toward electoral politics tend to be passive and apathetic, grounded in the belief that authority belongs to God, although they remain within the legal framework of the democratic state.

Keywords: *Khilafatul Muslimin, democracy, institutionalism*

**ANALISIS INSTITUSIONALISME BARU TERHADAP KHILAFATUL
MUSLIMIN DAN SIKAP ANGGOTA MENGENAI DEMOKRASI
(STUDI DI PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh
GEDE ARI PRATAMA PUTRA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **ANALISIS INSTITUSIONALISME BARU
TERHADAP KHILAFATUL MUSLIMIN DAN
SIKAP ANGGOTA MENGENAI
DEMOKRASI (STUDI DI PROVINSI
LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **GEDE ARI PRATAMA PUTRA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2126021001**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si
NIP. 19640508 199303 1 004

Prof. Arizka Warganegara, M.A., Ph.D
NIP. 19810620 200604 1 003

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Feni Rosalia', is written over the text of the second member of the committee.

Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si
NIP. 19690219 199403 2 001

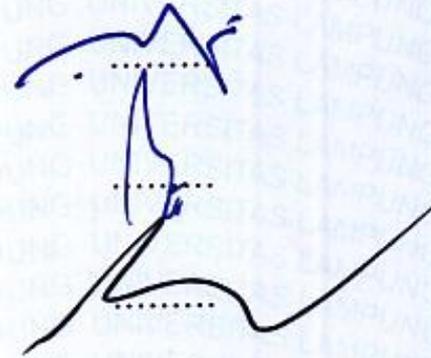
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.

Sekretaris : Prof. Arizka Warganegara, M.A., Ph.D.

Penguji Utama : Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 19760821 200003 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “Analisis Institusionalisme Baru Terhadap Khilafatul Muslimin dan Sikap Anggota Mengenai Demokrasi (Studi di Provinsi Lampung)” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Gede Ari Pratama Putra
NPM. 2126021001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Gede Ari Pratama Putra dilahirkan di Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada 27 Januari 1990, sebagai anak pertama dari pasangan Wayan dan Made. Jenjang pendidikan formal penulis dimulai di Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Penarukan, dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Singaraja dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Singajara yang seluruhnya berada di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

Tahun 2008 penulis melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan menyelesaikan pendidikan tahun 2012 dengan gelar Sarjana Intelijen (S.In). Penulis melanjutkan jenjang pendidikan Magister pada tahun 2021 di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagai mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

MOTTO

Cogito Ergo Sum

Aku Berpikir Maka Aku Ada

(René Descartes)

*Karya ini didedikasikan untuk **Aria** – tambah pengalaman, terus tumbuh dan berkembang.*

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan berjudul “**Analisis Institusionalisme Baru Terhadap Khilafatul Muslimin dan Sikap Anggota Mengenai Demokrasi (Studi di Provinsi Lampung)**” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran sehingga membantu kelancaran penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Prof. Arizka Warganegara, M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan tesis serta saran yang selalu diberikan ketika penulis menemukan kesulitan dalam proses penulisan tesis ini.

7. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Dosen Penguji Utama tesis ini, terimakasih atas segala saran dan masukan yang diberikan demi perbaikan dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran dalam memberikan perkuliahan di Magister Ilmu Pemerintahan.
9. Seluruh Staf Magister Ilmu Pemerintahan terimakasih telah memberikan banyak bantuan kepada penulis yang berkaitan dengan administrasi.
10. Seluruh informan yang dengan sukarela membantu penulis dalam menjawab setiap pertanyaan yang penulis ajukan dan tidak segan memberikan bantuan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
11. Semua teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 terimakasih atas kebersamaan kita.
12. Keluargaku : Bu Utiek, Dong Luh, Pak Wayan (alm), Bu Made, Kadek dan Dhira yang sudah senantiasa berdoa dan memberikan semangat. Semoga kebahagiaan selalu bersama kita semua.
13. Keluarga besarku: Pak Suryo, Mas Bagus, Mas Sigit, Bro Ricky, Rizal, Edo, Orina Glory FC (Maul, Anam, Nana, Nasa, Kiky, Alwi), Beth-Mey-Dave, Desli-Didit, Bayu, Chul, Bhre, dan Nicko serta keluarga besar Bapak Haji Thobari, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
14. Untuk diri sendiri (pikiran, jiwa dan raga), terimakasih sudah berkolaborasi untuk berjuang.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Gede Ari Pratama Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	v
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teori Kelembagaan Baru (<i>New Institutionalism</i>).....	11
2.2 Tinjauan Teori Budaya Politik.....	16
2.3 Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian	25
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Informan Penelitian.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Pengolahan Data	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	34

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum Tentang Khilafatul Muslimin	38
4.1.1 Ma'lumat Berdirinya Khilafatul Muslimin	38
4.1.2 Latar Belakang Terbentuknya Khilafatul Muslimin.....	44
4.1.3 Khilafah Menurut Khilafatul Muslimin.....	46
4.1.4 Struktur Khilafatul Muslimin	49
4.1.5 Kaderisasi Kepemimpinan Khilafatul Muslimin.....	58
4.2. Sikap Khilafatul Muslimin Terhadap Demokrasi dalam Perfektif Institusionalisme Baru.....	62
4.2.1 Institusionalisme Historis : Pengembangan Narasi Historis Kekhilafahan Sebagai Sistem Pemerintahan yang Ideal	63
4.2.2 Institusionalisme Pilihan Rasional : Stratagi Adaptif dalam Ruang Demokrasi.....	71
4.2.3 Institusionalisme Sosiologis : Membentuk Identitas dan Makna Sosial	86
4.2.4 Institusionalisme Konstruktivis : Pembentukan Makna, Identitas Ideologis, dan Simbol Kolektif dalam Struktur Khilafatul Muslimin	95
4.2.5 Institusionalisme Jaringan: Jejaring Sosial, Aliran Informasi, dan Mekanisme Koordinasi dalam Struktur Khilafatul Muslimin	103
4.3. Sikap Anggota Khilafatul Muslimin Terhadap Politik Elektoral	109
V. SIMPULAN DAN SARAN	113
5.1 Simpulan	113
5.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Informan.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Komponen Analisis Data.....	36
2. Ilustrasi Sudut Lancip	43
3. Struktur Khilafatul Muslimin.....	44
4. Sebaran Wilayah Khilafatul Muslimin di Indonesia Berdasarkan Provinsi	49
5. Sebaran Khilafatul di Provinsi Lampung.....	52

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang memberikan sepenuhnya kedaulatan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Prinsip-prinsip demokrasi ini tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan termaktub secara eksplisit pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi yang dijalankan mencerminkan sistem pemerintahan yang bersumber dari kehendak rakyat, di mana rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengelola pemerintahan. Sistem demokrasi ini memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, sebab demokrasi dipandang sebagai sarana utama untuk menjamin dan menghargai hak-hak dasar tersebut. Demokrasi di Indonesia sendiri dikenal sebagai demokrasi Pancasila, yang memiliki karakteristik khas sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara (Humaira, 2012).

Demokrasi merupakan sistem yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan prinsip kebebasan serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Sistem ini menciptakan ruang terbuka untuk tumbuhnya sikap saling menghargai dan munculnya ide-ide baru. Namun, bersamaan dengan itu, demokrasi juga menyediakan ruang bagi munculnya gerakan-gerakan radikal, termasuk radikalisme berbasis agama, meskipun gerakan tersebut secara terbuka menolak prinsip-prinsip demokrasi. Pada era Orde Baru yang bersifat otoriter, kelompok radikal tidak memiliki peluang untuk berkembang, tetapi setelah era reformasi dan terbukanya sistem demokrasi,

mereka mendapatkan ruang untuk tampil dan memengaruhi dinamika politik nasional. Inilah yang menjadi kekuatan sekaligus ironi dalam sistem demokrasi itu sendiri (Darwin, 2012). Fenomena ini menandai munculnya berbagai kelompok ideologis yang mulai menyuarakan gagasan alternatif terhadap sistem demokrasi dan dasar negara. Salah satu ekspresi yang menonjol ialah upaya menggantikan ideologi negara dengan sistem pemerintahan lain.

Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi menjadi acuan utama yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski demikian, perkembangan demokrasi yang membuka ruang kebebasan telah dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok yang berusaha memperjuangkan sistem pemerintahan khilafah berbasis syariat Islam di Indonesia. Kelompok-kelompok ini membawa paham radikal dan mendorong pembentukan negara kekhilafahan sebagai pengganti ideologi negara, serta menyebarkan ajaran yang menolak atau mengesampingkan nilai-nilai keberagaman (Jejen, 2015).

Secara prinsip, khilafah dan Pancasila memang memiliki perbedaan, khususnya dalam penerapannya sebagai sistem pemerintahan dan bentuk negara. Meskipun demikian, terdapat sejumlah nilai yang dapat saling beririsan, bahkan memungkinkan untuk saling melengkapi, terutama dalam konteks pengelolaan pemerintahan. Sistem khilafah memiliki karakteristik tersendiri yang didasarkan pada empat pilar utama, mencakup kedaulatan mutlak berada di tangan Allah SWT, sementara kekuasaan dijalankan oleh umat, keharusan diangkatnya seorang khalifah untuk seluruh dunia Islam, serta kewenangan khalifah dalam menetapkan atau mengadopsi hukum dan peraturan yang sepenuhnya merujuk pada syariat Allah. Setiap ketentuan yang bertentangan dengan hukum Allah dianggap tidak sah (Taqiyuddin, 2002).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya telah mencerminkan sebagian prinsip yang juga dijunjung dalam sistem khilafah, meskipun bentuk negara dan sistem pemerintahannya berbeda. Ini menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dijadikan sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa menjadikan agama sebagai dalih untuk mengabaikan kepentingan bersama dan kemaslahatan publik. Gagasan penerapan khilafah secara penuh di Indonesia tidak sejalan dengan realitas sosial-politik bangsa, terlebih jika diarahkan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila adalah hasil konsensus nasional yang bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Meski demikian, masih terdapat kelompok-kelompok yang tetap mendorong pendirian Daulah Islam dengan sistem khilafah, bahkan dengan menempuh pendekatan yang bersifat kekerasan dan radikal untuk menolak eksistensi Pancasila.

Radikalisme keagamaan merupakan fenomena yang dapat ditafsirkan melalui berbagai perspektif, namun secara substansial Pancasila kerap dikaitkan dengan pertentangan yang tajam terhadap nilai-nilai yang diusung oleh kelompok-kelompok tertentu dan sistem sosial-politik yang ada. Gerakan radikal dalam lingkungan keagamaan umumnya mencerminkan upaya mengubah tatanan sosial dan politik secara menyeluruh melalui pendekatan kekerasan. Situasi di Indonesia menunjukkan bahwa kecenderungan semacam ini kian mengkhawatirkan dan telah berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius. Eskalasi radikalisme di Indonesia menjadi indikasi nyata yang tidak bisa diabaikan ataupun dihilangkan begitu saja (Ariyani, 2016).

Satu-satunya cara kelompok radikal untuk mewujudkan penerapan Sistem Khilafah yakni dengan mengubah dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan radikalisme keagamaan di Indonesia ditunjukkan dengan munculnya berbagai kelompok agama yang berhaluan keras, Kelompok-kelompok anti Pancasila yang ada di Indonesia

diantaranya Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamasikan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949 dan dibubarkan oleh pemerintah pada 2 September 1962. Selain kelompok agama, Indonesia juga memiliki sejarah panjang adanya gerakan-gerakan kelompok radikal secara ideologi, pendirian negara dalam negara hingga gerakan separatisme diantaranya gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai kelompok berideologi komunis yang memiliki sejarah panjang pemberontakan dan resmi dinyatakan dilarang di Indonesia pada 5 Juli 1966 melalui TAP MPRS No. XXV Tahun 1966; Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang didirikan tahun 1958 di Sumatera Barat dan Perjuangan Semesta (Permesta) yang didirikan tahun 1957 di Sulawesi Utara sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi pemerintah pusat; Republik Maluku Selatan (RMS) yang didirikan tahun 1950 untuk memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara baru; hingga Aceh Merdeka sebagai respon atas hilangnya status sebagai Daerah Istimewa.

Sementara itu, pasca reformasi juga muncul kelompok-kelompok separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta berbagai kelompok yang menolak sistem demokrasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Darul Islam/Negara Islam Indonesia, dan Khilafatul Muslimin, kerap muncul ke permukaan sebagai tantangan terhadap konsensus nasional.

Kelompok khilafah yang anti demokrasi paling aktual adalah Khilafatul Muslimin yang menjadi perhatian publik secara luas pada 2022 yang ditandai dengan penangkapan Khalifah Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja pada 11 Juni 2022 oleh Tim Ditreskrim Polda Metro Jaya atas kasus ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 59 Ayat 4 juncto Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Kompas, 2022). Penangkapan Khalifah Khilafatul Muslimin tersebut juga diikuti dengan penertiban plang dan atribut

Khilafatul Muslimin di Provinsi Lampung. Namun, dalam perkembangannya jemaah Khilafatul Muslimin tidak membubarkan diri dan tetap melaksanakan aktivitas kelembagaan meskipun tidak secara terbuka seperti sebelumnya.

Khilafatul Muslimin didirikan pada 18 Juli 1997 di Kota Bandar Lampung melalui sebuah Ma'lumat, dan mendeklarasikan diri sebagai wadah persatuan umat Islam dalam berjamaah melalui sistem kekhalifahan yang dipimpin oleh seorang Khalifah atau Amirul Mu'minin. Organisasi ini menargetkan pendirian perwakilan di berbagai negara di dunia, masing-masing dipimpin oleh seorang Amir pada tingkat wilayah atau negara. Kantor Pusat Kekhalifahan Islam Khilafatul Muslimin berlokasi di Jalan WR Supratman, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Berlandaskan ajaran Islam, organisasi ini menyatakan akan menyelesaikan persoalan umat melalui Musyawarah Kekhalifahan yang dilaksanakan secara terbuka dan bebas. Sebagai kelompok yang mengukung konsep khilafah, Khilafatul Muslimin meyakini bahwa umat Islam dapat dipersatukan dalam sebuah Kekhalifahan universal yang melampaui batas-batas negara. Struktur internal organisasi ini telah menyerupai sistem kenegaraan, lengkap dengan aturan-aturan kekhalifahan yang dalam praktiknya kadang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun di Provinsi Lampung.

Keberadaan serta aktivitas Khilafatul Muslimin sering diasosiasikan sebagai bagian dari kelompok radikal yang memiliki agenda untuk mengganti dasar negara. Wibowo (2020) menjelaskan bahwa konsep khilafah menjadi bagian dari perang *mindset* yang dilancarkan oleh kelompok "radikal" dalam upaya menggantikan ideologi negara. Proses sekuritisasi terhadap gerakan ini berlangsung melalui berbagai tindakan ujaran (*speech act*) yang dilakukan secara simultan, dan hal tersebut berdampak terhadap kebebasan warga negara dalam berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat. Sementara itu, Mundzir (2013) menyampaikan Khilafatul Muslimin hadir sebagai respon atas perkembangan modernitas untuk menyerukan kembali

ajaran agama yang murni dan mengusung misi besar menegakan khilafah dengan sistem pemerintahan Islami melawan sistem demokrasi. Oleh karena itu, Reskike (2019) dalam penelitian berjudul "Sistem Pemerintahan Islam di Dunia Modern" menyimpulkan bahwa cita-cita Khilafatul Muslimin menegakkan Sistem Pemerintahan Islam tidak cocok dengan keberagaman latarbelakang masyarakat di Indonesia dan tidak sesuai dengan konstitusi.

Juliansyah dkk (2019) menyoroti adanya pertentangan ideologis antara Khilafatul Muslimin dan negara, yang tercermin dalam sikap anti terhadap pemerintah. Penolakan terhadap sistem demokrasi serta sikap oposisi terhadap pemerintah dapat terlihat secara nyata dalam kasus pelanggaran hukum yang melibatkan Khalifah Khilafatul Muslimin, Abdul Qodir Hasan Baraja, bersama Amir Wilayah Khilafatul Muslimin Bandar Lampung. Keduanya dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 3 bulan 3 hari karena terbukti melanggar Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka dinyatakan bersalah karena secara sengaja menghasut serta menghambat pelaksanaan upaya penanggulangan wabah, dalam hal ini terkait pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Kota Bandar Lampung pada 10 Agustus 2021.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut cenderung mengambil perpektif berkaitan dengan kategorisasi radikal, Islamisme, serta pertentangannya terhadap negara. Namun, Khilafatul Muslimin sebagai lembaga penganut sistem khilafah tentunya memiliki sudut pandang yang berlawanan dengan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Khilafatul Muslimin menganggap demokrasi sebagai sistem yang bertentangan dengan Aqidah Islam dan menilai demokrasi yang bermakna kekuasaan ada di tangan rakyat mampu menjadikan sesuatu yang semula halal dianggap haram, dan yang haram dianggap halal karena suara terbanyak sudah memutuskan dan mendukungnya. Penentangan Khilafatul Muslimin terhadap demokrasi terdokumentasi dalam Majalah Islam Al-Khilafah Edisi 63 Shafar 1438 H

halaman 95 (KhilafatulMuslimin, 2016) Rubrik Kotak Pembaca dalam menyikapi ajakan Aksi Bela Islam terkait kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dan menjelang Pilgub Jakarta 2017, Khilafatul Muslimin menyatakan bahwa muslim yang hidup dalam sistem demokrasi dan menerapkan hukum buatan manusia yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945, dengan mengabaikan hukum dan aturan yang berasal dari Allah, dianggap sebagai bagian dari Thagut. Khilafatul Muslimin secara terang-terangan menyatakan sikap *baro* ' atau melepaskan diri dari sistem demokrasi, termasuk seluruh aturannya dan individu-individu yang secara sukarela mendukung sistem tersebut. Selain itu, Majalah Islam Al-Khilafah Edisi 69 Dzulqo'dah 1439 H halaman 95 (KhilafatulMuslimin, 2018) Rubrik Kotak Pembaca dalam menyikapi Pilpres 2019, Khilafatul Muslimin menyampaikan bahwa sistem demokrasi adalah batil dan Islam memiliki sistem sendiri. Khilafatul Muslimin mentaati Khalifah / Amirul Mukminin sebagai bentuk ibadah kepada Allah serta taat kepada Ulil Amri yang berhukum kepada Qur'an dan Hadits. Sementara, terhadap sistem lainnya yang dibuat oleh akal manusia, Khilafatul Muslimin berlepas diri, tidak mau mengganggu dan membiarkan mereka beraktivitas (toleransi).

Kecenderungan Khilafatul Muslimin yang anti demokrasi menarik untuk diteliti lebih lanjut berkaitan dengan sikap Khilafatul Muslimin secara kelembagaan terhadap proses demokrasi dalam menentukan pemimpin yaitu melalui politik elektoral. Jemaah Khilafatul Muslimin di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai 2.000 orang (bbc.com, 2022) yang potensial menjadi kelompok golongan putih (golput) pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) mengingat pertentangan Khilafatul Muslimin secara kelembagaan terhadap demokrasi. Meskipun, Khalifah Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja pada 24 Januari 2023 telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi karena terbukti secara sah melakukan penyebaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila, hal tersebut tidak serta merta membubarkan

atau menghentikan kegiatan jemaah Khilafatul Muslimin di Provinsi Lampung. Radikalisme berasal dari kata "radikal", yang berarti akar atau dasar. Dalam konteks sosial-politik, radikalisme berarti upaya untuk mengubah tatanan yang ada secara menyeluruh hingga ke akarnya. Radikalisme semakin berkembang melalui media sosial dan platform digital, mempengaruhi generasi muda dengan narasi-narasi ekstrem yang membahayakan keberagaman, toleransi, dan keutuhan bangsa.

Khilafatul Muslimin menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui perspektif kelembagaan untuk menjelaskan bagaimana Kekhalifahan Khilafatul Muslimin terbentuk dan perkembangan kelembagaannya serta menjelaskan bagaimana Khilafatul Muslimin sebagai kelompok penganut Sistem Khilafah dalam menyikapi demokrasi khususnya politik elektoral. Penelitian juga akan menjelaskan bagaimana sikap Khilafatul Muslimin terhadap demokrasi dan apakah ada instruksi khusus kepada anggotanya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih menyikapi politik elektoral apakah keputusan memilih atau tidak memilih didasarkan atas instruksi dari Khilafatul Muslimin secara kelembagaan yang memang harus dipatuhi atau jemaah diberikan kebebasan untuk bersikap yang artinya justru bertentangan dengan konsep khilafah yang diusungnya. Penelitian mengambil lokus di Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat didirikannya Kampung Khilafah yang diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan Khilafatul Muslimin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perkembangan Khilafatul Muslimin dari perspektif Intitusionalisme Baru?
- b. Bagaimana sikap anggota Khilafatul Muslimin sebagai kelompok penganut Sistem Khilafah dalam menyikapi demokrasi dan politik elektoral?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam tesis ini meliputi hal-hal berikut:

- a. Mengkaji perkembangan dan dinamika Khilafatul Muslimin dari perspektif Intitusionalisme Baru.
- b. Menganalisis sikap anggota Khilafatul Muslimin sebagai kelompok penganut Sistem Khilafah terhadap demokrasi dan politik elektoral.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai hasil dari kegiatan akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Manfaat penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran dan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam memahami fenomena tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok anti demokrasi serta dinamika sikap politik mereka terhadap pelaksanaan Pemilu dalam negara demokratis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman teoretis tentang relasi antara ideologi keagamaan dan partisipasi politik, serta memperkaya pendekatan analitis dalam mengkaji perilaku politik *non-mainstream* melalui integrasi teori Institusionalisme Baru dan Budaya Politik.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan untuk membuat suatu kebijakan yang sama dan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan, antara lain :

- 1) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dalam merumuskan kebijakan pembinaan ideologi serta strategi pendekatan persuasif terhadap kelompok keagamaan yang mengembangkan ideologi selain Pancasila.
- 2) Bagi penyelenggara pemilu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KPU dan Bawaslu dalam menyusun strategi sosialisasi pemilu dan pemberian pendidikan politik bagi pemilih berbasis nilai-nilai kebangsaan, serta membangun kemitraan dengan tokoh-tokoh lokal untuk meningkatkan partisipasi politik secara substantif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Kelembagaan Baru (*New Institutionalism*)

Teori kelembagaan Baru atau *New Institutionalism* merupakan kerangka pemikiran yang menjelaskan bahwa eksistensi dan struktur organisasi tidak terbentuk secara bebas, melainkan sangat dipengaruhi oleh tekanan institusional dari lingkungan sekitarnya. Organisasi dituntut untuk membuktikan legitimasi agar dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Menurut Ridha (2012), keberhasilan organisasi dalam bertahan dan berkembang ditentukan oleh kemampuannya menunjukkan diri sebagai entitas yang sah secara sosial.

Teori kelembagaan Baru menjelaskan bahwa tindakan individu dan organisasi sering kali dipandu oleh norma sosial, ekspektasi eksternal, serta kondisi lingkungan yang bersifat memaksa maupun normatif. Dalam hal ini, organisasi tidak hanya mengejar efisiensi internal, tetapi juga berusaha memenuhi standar yang ditentukan oleh masyarakat sekitarnya (Fitrianto, 2015).

Scott (2008) menyatakan bahwa pendekatan kelembagaan digunakan untuk memahami perilaku organisasi, khususnya dalam konteks sektor publik. Ia mengemukakan tiga pilar utama dalam struktur institusi: regulatif, normatif, dan kognitif budaya. Pilar regulatif mencakup sistem aturan, mekanisme pengawasan, serta sanksi yang bertujuan menegakkan kepatuhan.

Penegakan ini dapat dilakukan secara formal melalui hukum atau secara informal melalui kebiasaan masyarakat. Meskipun bersifat membatasi aturan institusional juga memberikan peluang tertentu bagi aktor di dalamnya.

Pilar normatif berkaitan dengan nilai dan norma yang dijadikan dasar bagi perilaku organisasi. Nilai-nilai tersebut memandu proses pembuatan kebijakan serta menciptakan komitmen moral di antara para anggota lembaga. Norma sosial juga berfungsi memperkuat stabilitas sistem dan menyelaraskan perilaku individu dengan kepentingan kolektif.

Sementara itu, pilar kognitif budaya menekankan aspek persepsi, kepercayaan, dan konstruksi makna dalam institusi. Pilar ini menjelaskan bagaimana aktor memaknai realitas sosial berdasarkan kerangka budaya tertentu. Berbeda dengan dua pilar sebelumnya, dimensi kognitif bersifat lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, karena berkaitan erat dengan cara individu menginterpretasikan simbol, peran, dan praktik sosial.

Menurut Hall dan Taylor (1996), pendekatan kelembagaan baru terbagi ke dalam tiga varian utama, yakni Institusionalisme Historis, Institusionalisme Pilihan Rasional, dan Institusionalisme Sosiologis. Ketiganya memiliki fokus analisis dan asumsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana institusi memengaruhi perilaku politik dan kebijakan publik.

Institusionalisme Historis lahir sebagai reaksi terhadap pendekatan pluralisme politik dan fungsionalisme struktural yang mendominasi ilmu politik pada era 1960–1970-an. Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen politik dan struktural, serta memusatkan perhatian pada pentingnya institusi formal dalam memengaruhi hasil-hasil politik (Steinmo, 1992). Konteks sejarah dan jejak kebijakan masa lalu dianggap menentukan arah perkembangan institusional di masa depan.

Blackburn (1972) menjelaskan bahwa pengaruh fungsionalisme struktural tercermin dalam cara pandang institusionalis historis terhadap sistem pemerintahan sebagai rangkaian subsistem yang saling bergantung. Namun, fokus utama tetap pada lembaga-lembaga politik dan ekonomi sebagai penentu utama perilaku kolektif.

Menurut Thelen (1992), institusi didefinisikan sebagai prosedur formal maupun informal, norma, serta rutinitas yang tertanam dalam struktur organisasi politik atau ekonomi. Hubungan antara institusi dan perilaku individu dipahami dalam pengertian yang luas, termasuk bagaimana distribusi kekuasaan dan ide memengaruhi pengambilan keputusan. Institusionalisme historis juga menekankan pentingnya *path dependency*, yaitu kecenderungan sistem untuk mengikuti jalur kebijakan yang telah ada, meskipun hasilnya mungkin tidak optimal.

March dan Olsen (1989) mengembangkan dua pendekatan dalam tradisi ini: pendekatan kalkulus dan pendekatan budaya. Pendekatan kalkulus melihat institusi sebagai mekanisme yang mengatur perilaku individu dengan menyediakan ekspektasi stabil tentang tindakan aktor lain. Sementara pendekatan budaya menekankan pentingnya norma dan identitas kolektif dalam membentuk rutinitas institusional.

Institusionalisme historis juga memberikan perhatian besar pada interaksi antara ide dan institusi (Hall dan Taylor, 1996). Misalnya, studi Immergut (1992) menunjukkan bagaimana struktur institusi kesehatan memengaruhi perilaku kelompok profesi seperti dokter dalam merespons reformasi kebijakan. Pierson (1994) menambahkan bahwa pilihan kebijakan di masa lalu dapat menciptakan struktur kepentingan baru yang mengunci arah kebijakan selanjutnya. Oleh karena itu, analisis historis menjadi kunci untuk memahami perubahan dan keberlanjutan institusi dalam jangka panjang.

Sementara itu, Institusionalisme Pilihan Rasional memandang institusi sebagai seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur interaksi antar individu yang bertindak rasional dalam mengejar kepentingan mereka. Dalam pendekatan ini, institusi berfungsi sebagai penentu strategi dan alat untuk mengurangi ketidakpastian serta biaya transaksi (Peters, 2012).

Terdapat tiga model utama dalam kerangka ini. Model *principal-agent* menggambarkan hubungan antara pemberi mandat (*principal*) dan pelaksana (*agent*) yang diatur melalui kontrak atau mekanisme pengawasan. Dalam konteks negara, hubungan ini dapat ditemukan antara parlemen dan birokrasi (Putra dan Sanusi, 2019). Model kedua, *game theory*, menekankan interaksi strategis antar aktor yang memiliki posisi setara dan kepentingan masing-masing. Proses negosiasi dan pembentukan koalisi menjadi penting dalam mencapai keseimbangan atau hasil yang saling menguntungkan. Model ketiga adalah pendekatan *rule-based*, yang menempatkan institusi sebagai aktor utama dalam menciptakan stabilitas dan pengendalian perilaku. Ostrom menekankan bahwa seperangkat aturan yang dirancang dengan baik dapat mendorong kepatuhan dan mencegah penyimpangan dalam komunitas (Putra dan Sanusi, 2019).

Institusionalisme pilihan rasional beranggapan bahwa institusi memiliki kapasitas untuk membentuk perilaku aktor melalui insentif dan sanksi. Selama tidak terjadi perubahan signifikan dalam struktur institusi, tindakan individu dapat diprediksi dan dikendalikan secara relatif.

Institusionalisme Sosiologis (*Sociological Institutionalism*), di sisi lain, menempatkan institusi dalam kerangka budaya dan norma sosial. Perubahan institusional dianggap sebagai hasil dari pembelajaran sosial dan proses internalisasi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (Putra dan Sanusi, 2019).

Checkel (2001) menyatakan bahwa proses institusionalisasi terjadi melalui dua tahapan: pertama, diskursus ide yang memperkenalkan nilai-nilai baru kepada aktor; kedua, difusi norma secara luas ke dalam struktur sosial. Dalam tahap ini, komunikasi memainkan peran sentral dalam membentuk cara pandang kolektif.

Institusi dipandang sebagai "skrip kognitif" yang membentuk harapan sosial terhadap perilaku yang dianggap sah. Oleh karena itu, aktor (termasuk negara) tidak dapat bertindak bertentangan dengan norma dominan jika ingin mempertahankan legitimasi sosial. Prinsip ini menjadikan organisasi sebagai konstruksi sosial yang mencerminkan sistem nilai dan identitas budaya masyarakatnya.

Institusionalisme Sosiologis (*Sociological Institutionalism*) menganggap bahwa organisasi tidak hanya berperan secara fungsional, tetapi juga simbolik. Identitas, peran, dan legitimasi dibangun melalui representasi simbolik yang memengaruhi pola interaksi dan struktur internal organisasi. Perspektif ini sangat relevan untuk menelusuri bagaimana organisasi keagamaan membentuk basis sosialnya melalui proses simbolisasi dan internalisasi nilai.

Di luar ketiga pendekatan utama tersebut, Institusionalisme Jaringan (*Network Institutionalism*) memperkaya pemahaman dengan menyoroti pentingnya struktur hubungan dan aliran informasi dalam membentuk serta mempertahankan institusi. Perspektif ini menekankan bahwa aktor tidak beroperasi secara terisolasi, melainkan terhubung dalam jejaring sosial yang saling bergantung (Kenis dan Schneider, 1991). Relasi dalam jaringan ini dapat bersifat formal maupun informal, horizontal maupun vertikal, dengan distribusi kekuasaan yang sering kali tidak merata (Rhodes, 1997). Dalam konteks kelembagaan, legitimasi dan stabilitas sering kali berasal dari kekuatan jaringan interpersonal dan solidaritas sosial yang terbangun secara bertahap.

Institusionalisme Konstruktivis (*Constructivist Institutionalism*) menambahkan dimensi ide dan wacana sebagai variabel utama dalam pembentukan institusi. Menurut Hay (2006), institusi tidak hanya dibentuk oleh aturan atau norma, tetapi juga oleh cara aktor mengkonstruksi realitas sosial melalui proses interpretatif. Identitas, ideologi, dan narasi bersama menjadi fondasi penting dalam menciptakan makna kolektif yang mendasari keberlangsungan institusi. Schmidt (2008) menjelaskan bahwa diskursus dan komunikasi memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengubah institusi, terutama dalam konteks perubahan sosial dan politik yang cepat.

Kombinasi dari lima pendekatan dalam teori kelembagaan baru ini memberikan kerangka konseptual yang luas dan dalam untuk memahami dinamika organisasi seperti Khilafatul Muslimin. Institusi dipahami bukan hanya sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai hasil dari proses historis, kalkulasi strategis, jaringan sosial, konstruksi kultural, dan interaksi diskursif.

2.2 Tinjauan Teori Budaya Politik

Budaya politik merupakan kondisi yang memberikan warna dan karakter tertentu dalam kehidupan sosial serta sistem politik suatu masyarakat. Budiardjo (2008) mendefinisikan budaya politik sebagai keseluruhan gagasan, norma, pola orientasi terhadap kehidupan politik, serta falsafah hidup yang berlaku dalam masyarakat. Fokus utama dari konsep ini adalah aspek psikologis dalam sistem politik, mencakup perilaku keagamaan, simbolisme politik, serta cita-cita kolektif masyarakat. Oleh karena itu, budaya politik mencerminkan aspek subjektif yang melekat dalam suatu sistem politik (Budiardjo, 2008).

Budaya politik mencerminkan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang memiliki dampak terhadap dinamika struktur dan sistem politik. Almond dan Verba dalam Anggara (2013) memaknai budaya politik sebagai orientasi

perilaku warga negara terhadap sistem politik beserta seluruh elemen yang terkait dengannya, termasuk perilaku partisipatif terhadap kehidupan politik. Mereka menekankan pada bagaimana pola orientasi eksklusif diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan politik dalam masyarakat (Anggara, 2013). Konsepsi ini menegaskan pentingnya peran orientasi politik dalam merancang partisipasi warga negara terhadap kekuasaan dan kebijakan.

Lebih lanjut, Almond (1965) menyatakan bahwa setiap sistem politik tercermin melalui pola orientasi dan tindakan politik yang khas. Pye (1965) mengartikulasikan budaya politik sebagai "realitas subjektif yang teratur dalam politik". Sementara itu, definisi dari Verba (1965) menjelaskan bahwa budaya politik mengacu pada sistem keyakinan mengenai interaksi politik serta keberadaan institusi-institusi politik yang menopangnya (Rahman, 2007).

Budaya politik suatu bangsa dapat didefinisikan sebagai penyebaran pola-pola orientasi masyarakat terhadap entitas-entitas politik yang ada. Warga negara biasanya mengidentifikasi diri mereka melalui simbol-simbol negara dan lembaga-lembaga pemerintahan berdasarkan orientasi yang dimilikinya. Orientasi tersebut menjadi dasar bagi individu untuk menilai serta memahami kedudukannya sistem politik. Penempatan diri warga negara ini selanjutnya dapat ditelusuri melalui klasifikasi orientasi politik yang bersifat kognitif, afektif, dan evaluatif.

Menurut Almond dalam Rahman (2007), sikap masyarakat terhadap sistem politik dapat ditelaah melalui tiga bentuk orientasi politik: kognitif, afektif, dan evaluatif. Orientasi kognitif mencerminkan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peran politik, institusi, simbol, serta kebijakan yang ada sistem politik. Orientasi afektif merujuk pada sikap emosional individu terhadap sistem politik, termasuk terhadap aktor, struktur, dan kebijakan politik yang memengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap sistem tersebut. Orientasi evaluatif berhubungan penilaian individu

terhadap unsur-unsur politik yang biasanya berdasarkan kombinasi antara standar nilai yang diyakini dan informasi yang dimiliki. Evaluasi ini juga melibatkan aspek etika, norma, serta moralitas politik yang dimiliki seseorang.

Sementara itu, Prawira (1998) membagi orientasi politik individu terhadap objek-objek politik menjadi tiga kategori: orientasi positif, negatif, dan netral. Orientasi positif dicirikan oleh tingkat kesadaran dan pengetahuan yang tinggi serta evaluasi yang mengarah pada penerimaan terhadap sistem politik. Sebaliknya, orientasi negatif menunjukkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran individu terhadap sistem politik, disertai kecenderungan menolak atau tidak menyetujui aspek-aspek sistem tersebut. Orientasi netral mencerminkan sikap apatis atau ketidakpedulian yang tinggi, di mana individu tidak menunjukkan ketertarikan atau keterlibatan berarti terhadap urusan-urusan politik. Ragam orientasi tersebut mencerminkan sejauh mana keberfungsian sistem politik disadari oleh warganya

Ketiga jenis orientasi politik ini seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain kehidupan nyata. Almond dalam Rahman (2007) menyatakan bahwa orientasi seseorang terhadap politik dapat dilihat sejumlah indikator sistematis.

Indikator pertama mencakup pengetahuan individu mengenai negara dan sistem politik secara umum, termasuk sejarah, konstitusi, kekuasaan, dan simbol-simbol negara, serta bagaimana perasaan dan evaluasinya terhadap aspek-aspek tersebut. Indikator berikutnya meliputi pemahaman tentang struktur kekuasaan, elite politik, serta proses pengambilan kebijakan bawah ke atas (*upward*). Evaluasi terhadap aktor-aktor tersebut juga turut mencerminkan sikap politik masyarakat. Selanjutnya, indikator orientasi juga mencakup pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan atas ke bawah (*downward*), termasuk bagaimana keputusan politik disampaikan dan diterima oleh masyarakat.

Orientasi politik juga tampak pemahaman individu terhadap hak dan kewajiban politiknya, strategi untuk berpartisipasi sistem, serta sejauh mana ia mengetahui norma-norma dan mengekspresikan pandangan politiknya. Pemaparan indikator-indikator ini memberikan landasan analitis yang kuat dalam menilai derajat partisipasi politik warga negara.

Menurut Sjamsudin (1993), orientasi politik merupakan bagian integral budaya politik yang berkembang di tengah masyarakat. Budaya politik mencakup sikap, kepercayaan, dan persepsi warga terhadap sistem serta simbol-simbol politik seperti bendera, bahasa, dan lembaga negara. Almond dan Verba dalam Rahman (2007) juga menjelaskan bahwa budaya politik mencerminkan orientasi khas masyarakat terhadap sistem dan partisipasi kehidupan politik. Almond membagi budaya politik menjadi tiga tipe, yakni parokial, subjek (kaula), dan partisipan.

1. Budaya Politik Parokial (*Parochial Political Culture*)

Budaya politik ini adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan - harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang biasa ditemukan didalam masyarakat - masyarakat yang belum berkembang, dimana spesialisasi politik sangat minimal.

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil dan sederhana, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan tugas. Tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan peranannya baik dalam bidang ekonomi,

sosial maupun keagamaan/spiritual. Selain itu, dalam budaya politik parokial juga menyatakan adanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Masyarakat dengan budaya politik parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik (Almond dan Verba, 1965).

Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasi dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik yang terdapat di negaranya (Winarno, 2008). Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik. Budaya ini hidup dalam masyarakat dimana orang-orangnya sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Selain itu, mereka juga tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.

2. Budaya Politik Subjek/Kaula (*Subject Political Culture*)

Masyarakat yang berbudaya politik subjek/kaula, mereka memang memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (*input*) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) masih sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang sah. Namun demikian, posisinya sebagai subjek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Diyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik (Almond dan Verba, 1965).

Pada budaya politik ini mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan/kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah – ubah, dikoreksi apalagi ditentang. Budaya politik ini ditemukan dalam masyarakat yang orang – orangnya secara pasif patuh terhadap pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik atau memberikan suara dalam pemilihan. Dalam budaya ini tidak dikembangkannya kapabilitas elektoral sehingga masyarakat enggan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Budaya politik subjek muncul jika orientasi afektif saja yang kuat (Winarno, 2008).

Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek/kaula, karena masing – masing warga negaranya tidak aktif. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik yang rendah dan keberdayaan politik yang rendah. Sehingga, sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi.

3. Budaya Politik Partisipan (*Participant Political Culture*)

Budaya politik partisipan menggambarkan kondisi di mana masyarakat telah memiliki kesadaran politik yang jelas dan ditujukan secara langsung kepada keseluruhan sistem politik. Orientasi warga tidak hanya terbatas pada sistem umum, tetapi juga mencakup struktur, proses pengambilan keputusan, hingga pemilihan umum. Perhatian terhadap masukan dan keluaran dari sistem politik tercermin sangat tinggi. Setiap individu memandang dirinya maupun orang lain sebagai bagian aktif dari kehidupan politik. Terdapat kesadaran akan hak serta tanggung jawab sebagai warga negara. Masyarakat juga menggunakan hak-hak politik yang dimilikinya secara nyata. Keputusan politik yang

dihasilkan tidak diterima begitu saja, melainkan disikapi secara kritis oleh masyarakat partisipan (Almond dan Verba, 1965).

Hal ini karena masyarakat telah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu. Budaya politik partisipan hidup dalam masyarakat yang orang-orangnya melibatkan diri dalam kegiatan politik atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik. Budaya politik partisipan muncul jika orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif dikembangkan secara maksimal dan seimbang (Winarno, 2008).

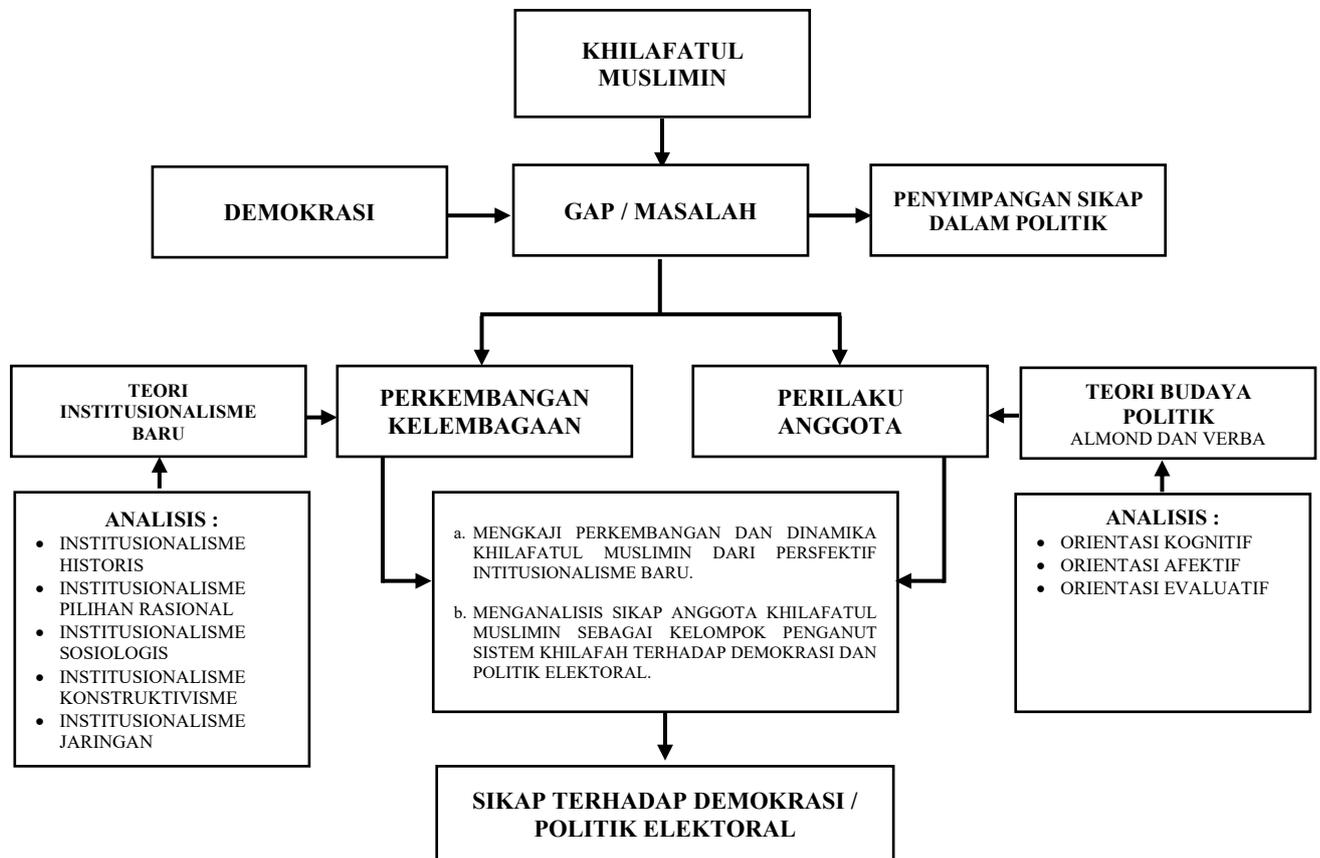
Budaya ini merupakan fondasi yang kuat bagi tumbuhnya demokrasi karena masyarakatnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan merasa memiliki peran sistem. Dengan demikian, budaya partisipan menjadi bentuk budaya politik yang ideal.

Model budaya politik yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki relevansi besar untuk dianalisis karena mampu mengidentifikasi karakteristik khas serta arah orientasi warga terhadap sistem dan proses politik. Budaya politik masyarakat menjadi komponen penting yang memengaruhi jalannya sistem politik di suatu negara. Konsep ini mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku individu terhadap tatanan politik yang berkembang. Orientasi kolektif masyarakat tidak terlepas dari orientasi individu yang membentuknya. Tindakan dan sikap politik setiap warga tercermin melalui bentuk keterlibatan mereka dalam kehidupan kenegaraan. Partisipasi dalam pemilihan umum, seperti menggunakan hak pilih untuk memilih Presiden atau anggota legislatif, menjadi manifestasi nyata dari budaya politik tersebut. Kelangsungan sistem politik sangat ditentukan oleh aktor yang menjalankan fungsinya di tengah masyarakat.

Pemilihan umum merupakan salah satu momen penting yang mencerminkan budaya politik masyarakat secara langsung. Sikap politik warga negara sangat menentukan perilaku memilih. Sebagian masyarakat menunjukkan kecenderungan rasional, pragmatis, atau bahkan apatis. Sebagian lainnya memiliki kesadaran politik yang tinggi dan mempertimbangkan secara matang pilihannya terhadap wakil rakyat di daerahnya masing-masing.

Penelitian ini menggunakan teori budaya politik Almond dan Verba (1965) sebagai salah satu kerangka analisis. Fokus diarahkan pada tiga dimensi pokok, yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Orientasi kognitif merujuk pada sejauh mana individu memahami dan mengetahui sistem politik, para aktor, serta mekanisme proses politik yang berlangsung. Orientasi afektif mencerminkan ikatan emosional individu terhadap simbol, nilai, maupun lembaga politik. Orientasi evaluatif mencerminkan sikap normatif dan penilaian etis terhadap legitimasi serta efektivitas kinerja sistem politik. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana persepsi dan sikap politik anggota Khilafatul Muslimin terbentuk terhadap pemilu. Analisis mencakup sejauh mana pemahaman mereka, bagaimana respons emosional mereka, serta bagaimana evaluasi yang mereka berikan terhadap praktik demokrasi elektoral di Indonesia. Teori ini dipilih karena mampu membedah aspek nilai dan persepsi subjektif yang membentuk hubungan antara warga negara dan sistem politik, khususnya pada kelompok keagamaan yang memiliki pandangan alternatif terhadap demokrasi.

2.3 Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif. Creswell (2018) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dilaksanakan dalam kondisi alamiah, di mana perilaku dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan berlangsung secara nyata. Fokus penelitian diarahkan pada sikap kelembagaan Khilafatul Muslimin serta perilaku politik para anggota atau jemaahnya terhadap sistem demokrasi elektoral yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini dipilih agar mampu menangkap dinamika realitas sosial secara utuh dan kontekstual.

Sementara itu, demi mencapai tujuan yang telah dirumuskan sejak awal, peneliti menetapkan desain penelitian sebagai pedoman kerja sistematis selama proses berlangsung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa metode ini bertujuan memberikan gambaran terperinci mengenai objek penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya tanpa terlebih dahulu melalui proses pengujian hipotesis. Desain ini juga mengarahkan fokus pada permasalahan aktual yang muncul saat penelitian dilakukan. Data yang dihimpun kemudian dianalisis secara menyeluruh hingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif dan interpretatif (Sugiyono, 2018).

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Institusionalisme Baru Terhadap Khilafatul Muslimin dan Sikap Anggota Mengenai Demokrasi (Studi di Provinsi Lampung)” merupakan topik yang menarik dan relevan, terutama mengingat dinamika politik di Indonesia serta pengaruh kelompok-kelompok dengan pandangan politik dan ideologi yang berbeda.

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap dinamika kelembagaan dan sikap politik Khilafatul Muslimin, khususnya di Wilayah Lampung Selatan, dengan menggunakan pendekatan Institusionalisme Baru (meliputi lima varian yaitu Historis, Pilihan Rasional, Sosiologis, Konstruktivis, dan Jaringan) serta Teori Budaya Politik. Fokus penelitian ditujukan untuk memahami bagaimana organisasi ini membentuk struktur kekhalifahan, menyebarkan ideologinya, serta merespons sistem demokrasi elektoral yang berlaku di Indonesia. Adapun rincian fokus spesifik penelitian ini meliputi:

1. Mengkaji proses pembentukan institusi kekhalifahan Khilafatul Muslimin, termasuk narasi historis pendirian melalui Ma'lumat tahun 1997, peran tokoh sentral seperti Abdul Qodir Hasan Baraja, serta legitimasi simbolik dan religius yang menopang struktur kelembagaan organisasi.
2. Mengkaji struktur kelembagaan dan pola koordinasi organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam perspektif Institusionalisme Baru, termasuk bagaimana organisasi membentuk sistem internal menyerupai negara dengan otoritas, aturan, dan sistem pengambilan keputusan yang berbasis syura (musyawarah) dan prinsip keimanan.
3. Mengidentifikasi dan mengkaji sikap ideologis Khilafatul Muslimin terhadap demokrasi dan pemilu, terutama bagaimana organisasi memaknai sistem demokrasi sebagai bertentangan dengan aqidah Islam, serta bagaimana sikap penolakan tersebut disampaikan melalui narasi

resmi organisasi seperti Majalah Al-Khilafah dan komunikasi kelembagaan lainnya.

4. Menelaah bentuk dan kecenderungan partisipasi politik anggota Khilafatul Muslimin di Wilayah Lampung Selatan terhadap Pemilu 2024, baik dalam bentuk partisipasi aktif, abstain (golput), maupun ketaatan terhadap arahan Khalifah, sebagai ekspresi dari orientasi politik yang terbentuk melalui internalisasi nilai ideologis organisasi.
5. Menetapkan wilayah Provinsi Lampung sebagai lokus utama penelitian khususnya di Kota Bandar Lampung sebagai lokasi Kantor Pusat Khilafatul Muslimin dan Kabupaten Lampung Selatan sebagai lokasi berdirinya “Kampung Khilafah” atau “Komplek Khilafah.” Wilayah ini menjadi pusat aktivitas kelembagaan Khilafatul Muslimin dengan fasilitas seperti kantor pusat kekhilafahan, pondok pesantren, klinik kesehatan, lembaga pendidikan tinggi, serta permukiman khusus anggota, sehingga relevan sebagai pusat pengamatan terhadap institusionalisasi nilai dan praktik organisasi.

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu atau informan yang memberikan data relevan terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian. Peneliti terlibat secara langsung dalam situasi sosial tertentu, melakukan observasi serta wawancara terhadap individu yang dianggap memahami konteks sosial tersebut secara mendalam. Penetapan informan dilakukan secara purposif, yakni melalui pertimbangan khusus yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa metode yang umum digunakan pada penelitian kualitatif meliputi *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Teknik purposif merupakan cara memilih sumber data yang dianggap paling sesuai karena memiliki pengetahuan atau posisi strategis seperti pengelola lembaga atau tokoh utama, sehingga memudahkan eksplorasi terhadap objek

dan konteks penelitian. Perluasan data dilakukan melalui teknik *snowball*, yaitu proses penelusuran berantai terhadap informan berikutnya karena sumber awal belum mampu memberikan informasi yang utuh (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini menetapkan subjek utama berdasarkan penilaian awal bahwa informan mampu memberikan jawaban atas fokus masalah yang diteliti. Jangkauan subjek kemudian diperluas apabila terdapat kebutuhan klarifikasi atau perbandingan informasi antar informan. Pemilihan informan tambahan bersifat fleksibel dan mengikuti perkembangan kebutuhan data lapangan. Teknik *snowball* diterapkan pada tahap ini, dimulai dari satu atau beberapa informan awal, yang kemudian berkembang menjadi jaringan informan baru hingga data yang diperoleh mencapai titik kejenuhan. Susunan informan telah dirancang sejak awal oleh peneliti berdasarkan relevansi dan keterkaitan informasi yang diharapkan, namun peneliti tetap menjaga anonimitas informan dengan pertimbangan objek penelitian dapat menjadi sensitif khususnya tokoh dan anggota Khilafatul Muslimin.

Tabel 1 Daftar Informan

Informan	Jabatan dalam Instansi	Keterangan Informasi	Waktu Wawancara
IF1	Nasyaroh Wal Idzaa'ah / Menteri Pemberitaan dan Penyiaran Khilafatul Muslimin Pusat.	Perkembangan Khilafatul Muslimin secara kelembagaan dan sikap terhadap demokrasi.	25 Februari 2025
IF2	Amir Khilafatul Muslimin Wilayah Lampung Selatan	Perkembangan Khilafatul Muslimin dan sikap anggota terhadap Pemilu.	23 Februari 2025
IF3	Amir Khilafatul Muslimin Umul Quro Muara Putih Natar	Perkembangan Khilafatul Muslimin dan sikap anggota terhadap Pemilu.	23 Februari 2025

IF4	Baitul Maal Khilafatul MusliminUmmul Quro Muara Putih Natar / Warga Khilafatul Muslimin	Perkembangan Khilafatul Muslimin dan sikap anggota terhadap Pemilu.	23 Februari 2025
IF5	Masulul Ummah Kemasulan Mujimulyo Tengah / Warga Khilafatul Muslimin	Perkembangan Khilafatul Muslimin dan sikap anggota terhadap Pemilu.	23 Februari 2025
IF6	Masulul Ummah Kemasulan Komplek Khilafah Barat / Warga Khilafatul Muslimin	Perkembangan Khilafatul Muslimin dan sikap anggota terhadap Pemilu.	23 Februari 2025
IF7	Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center	Perkembangan Khilafatul Muslimin dan sikap anggota terhadap demokrasi dan Pemilu.	16 Maret 2025
IF8	Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	Perkembangan Khilafatul Muslimin dan upaya – upaya pemerintah dalam pembinaan.	25 Februari 2025

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Bungin (2010) menyatakan bahwa objek informan pada penelitian kualitatif merupakan sasaran utama dari proses pengumpulan data. Sasaran tersebut tercermin melalui rumusan masalah yang telah dirancang, bukan sekadar tergambar pada judul atau topik penelitian. Objek yang menjadi fokus pada penelitian ini mencakup sikap kelembagaan Khilafatul Muslimin serta perilaku politik para jemaah atau anggotanya terhadap sistem elektoral di Indonesia. Rumusan ini dirancang guna menangkap hubungan antara struktur internal organisasi dan respons terhadap dinamika demokrasi yang berlangsung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian berjudul tentang “Analisis Institusionalisme Baru Terhadap Khilafatul Muslimin dan Sikap Anggota Mengenai Demokrasi (Studi di Provinsi Lampung)” membutuhkan kejelasan mengenai jenis serta sumber data yang digunakan agar menghasilkan temuan yang valid dan relevan. Klasifikasi data dibagi berdasarkan cara perolehannya dan sumber informasinya.

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data dikumpulkan langsung dari sumber utama melalui wawancara dan observasi non-partisipatif di lapangan. Sumber primer dalam konteks ini ialah anggota serta simpatisan Khilafatul Muslimin yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data diperoleh dari referensi yang telah tersedia sebelumnya seperti dokumen organisasi, artikel ilmiah, berita, buku, serta jurnal yang membahas Khilafatul Muslimin, pemilu, dan sikap politik kelompok Islam terhadap demokrasi.

2. Sumber Data Primer

a. Wawancara Semi Struktur

Teknik wawancara ini mengombinasikan elemen terstruktur dan terbuka. Pewawancara menyusun panduan pertanyaan, namun tetap memberi ruang eksplorasi terhadap jawaban informan. Menurut Sugiyono (2015), wawancara semi terstruktur relevan digunakan untuk menggali informasi mendalam tanpa membatasi narasumber. Informan yang direncanakan meliputi:

- 1) Pemimpin dan Tokoh Khilafatul Muslimin, bertujuan memperoleh pandangan langsung terkait posisi organisasi terhadap sistem pemilu dan demokrasi elektoral.

- 2) Anggota Khilafatul Muslimin, digunakan sebagai refleksi bagaimana ideologi organisasi ditafsirkan dan diterapkan dalam perilaku politik individual.
- 3) Pejabat Pemerintah dan Pengamat Radikalisme, bertindak sebagai sumber pembanding yang memberikan perspektif eksternal mengenai karakteristik dan orientasi politik Khilafatul Muslimin.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2015), observasi menjadi teknik penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti menangkap gejala sosial secara langsung dan alami. Dalam konteks ini, peneliti melakukan observasi non-partisipatif terhadap kegiatan-kegiatan Khilafatul Muslimin seperti sosialisasi atau syiar Khilafatul Muslimin baik konvoi motor maupun jalan sehat, musyawarah Khilafatul Muslimin Daulah Sumatera, forum-forum silaturahmi dan diskusi internal, kejadian-kejadian monumental, hingga aktivitas harian warga Khilafatul Muslimin di Kantor Pusat di Kota Bandar Lampung maupun di Kampung/Komplek Khilafah di Kabupaten Lampung Selatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memperoleh data dari berbagai sumber melalui serangkaian teknik pengumpulan data yang bervariasi dan berkesinambungan hingga mencapai titik kejenuhan informasi. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap menggunakan metode yang tepat agar dapat menggambarkan dinamika yang menjadi fokus kajian. Pemilihan pendekatan kualitatif membawa implikasi terhadap penggunaan teknik-teknik pengumpulan data yang mendalam dan kontekstual. Teknik yang digunakan merujuk pada panduan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015), yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

1. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2015), menjelaskan bahwa wawancara adalah pertemuan antara dua individu untuk saling bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, yang memungkinkan terbentuknya makna atas topik yang dibahas. Terdapat tiga bentuk wawancara: terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang diawali dengan pedoman pertanyaan tertulis, namun terbuka untuk pengembangan sesuai kebutuhan lapangan. Tujuan dari wawancara ini adalah menggali permasalahan secara lebih terbuka berdasarkan pendapat dan pemikiran narasumber. Informan yang diwawancarai mencakup Tokoh dan Anggota Khilafatul Muslimin, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, serta narasumber lain yang relevan.

2. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap perilaku, fenomena, atau aktivitas sosial yang diteliti. Observasi tidak hanya bertumpu pada informasi lisan atau dokumen, tetapi mengandalkan keterlibatan langsung peneliti dalam konteks alami. Terdapat dua bentuk pendekatan observasi: partisipatif dan non-partisipatif. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti terlibat langsung, sementara observasi non-partisipatif dilakukan secara eksternal tanpa keterlibatan langsung. Observasi juga dibedakan berdasarkan kesadaran subjek. Pada observasi terbuka, subjek mengetahui bahwa mereka diamati, sedangkan pada observasi tertutup, subjek tidak menyadarinya, yang memungkinkan data yang lebih alami, namun memerlukan perhatian terhadap pertimbangan etis. Peneliti telah melaksanakan observasi non-partisipatif kegiatan-kegiatan Khilafatul Muslimin seperti sosialisasi atau syiar Khilafatul Muslimin baik konvoi motor maupun jalan sehat, musyawarah Khilafatul Muslimin Daulah Sumatera, forum-forum silaturahmi dan diskusi internal, kejadian-

kejadian monumental, hingga aktivitas harian warga Khilafatul Muslimin di Kantor Pusat di Kota Bandar Lampung maupun di Kampung/Komplek Khilafah di Kabupaten Lampung Selatan. Pengamatan dilakukan oleh peneliti sejak 1 Juli 2020 sampai 28 Februari 2025.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup catatan atau arsip dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, seperti catatan pribadi, biografi, sejarah hidup, maupun visual seperti foto, sketsa, dan rekaman. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari teknik observasi dan wawancara, karena dapat memberikan konfirmasi atau pendalaman terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya. Peneliti dalam penelitian ini juga mengambil data dokumentasi dari laporan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung maupun Tim Pengawasan Ormas Provinsi Lampung perihal kegiatan Khilafatul Muslimin, dokumentasi dialog dan diskusi yang melibatkan tokoh Khilafatul Muslimin, berita di media online dan media massa.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk menelusuri referensi konseptual dan empiris yang relevan dengan nilai, budaya, serta norma yang berkembang pada situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Teknik ini mendukung penguatan teori dan perbandingan data empiris, melalui telaah terhadap buku, jurnal ilmiah, media cetak, dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Dalam konteks Khilafatul Muslimin, peneliti juga menelaah buku tentang Khilafatul Muslimin, modul internal dan majalah Al-Khilafah terbitan Khilafatul Muslimin, jurnal ilmiah dan sumber pustaka lainnya.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Upaya menjaga kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik pemeriksaan keabsahan data yang disebut triangulasi. Menurut Moleong (2017) triangulasi adalah metode untuk mengecek keabsahan data dengan menggunakan referensi lain di luar data utama sebagai alat pembanding atau verifikasi terhadap data hasil penelitian. Teknik triangulasi yang paling umum digunakan adalah triangulasi sumber. Tiga bentuk triangulasi yang dijelaskan oleh Moleong meliputi triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. Penggunaan triangulasi memberikan ruang bagi peneliti agar dapat menilai konsistensi dan keandalan data secara lebih komprehensif.

Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik sebagai alat uji kredibilitas data. Triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi informasi melalui perbandingan data yang diperoleh dari beragam narasumber. Peneliti melakukan wawancara terhadap berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan fokus kajian, seperti Tokoh Khilafatul Muslimin, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, pengamat radikalisme, serta narasumber lain yang dianggap relevan. Langkah ini diambil agar keabsahan informasi dapat diuji melalui perspektif yang beragam dan memperkuat validitas temuan di lapangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa analisis data dalam pendekatan kualitatif mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini dilakukan secara berkesinambungan hingga seluruh data dianggap telah jenuh dan tidak lagi menghasilkan informasi baru. Proses analisis dimulai sejak tahap pengumpulan data dan berlangsung terus hingga penyusunan kesimpulan akhir. Peneliti dalam hal ini telah mulai melakukan penafsiran awal terhadap jawaban narasumber sejak proses wawancara berlangsung. Jika informasi yang diberikan belum mencapai kedalaman yang dibutuhkan, maka dilakukan penggalian lanjutan

melalui pertanyaan tambahan. Analisis mengikuti tahapan sistematis sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2014) dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Huberman et al., 2014).

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap awal dilakukan melalui pengumpulan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan kategori yang relevan sesuai fokus masalah penelitian. Proses ini terus dikembangkan secara mendalam guna meningkatkan ketajaman informasi melalui pencarian data tambahan dari sumber yang relevan.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Proses kondensasi data mencakup penyaringan, penyederhanaan, serta seleksi informasi agar lebih terfokus. Data yang diperoleh dari catatan lapangan, hasil wawancara, studi dokumen, maupun sumber empiris lainnya disusun ulang menggunakan struktur yang lebih ringkas dan relevan. Informasi yang tidak memiliki nilai signifikan terhadap fokus penelitian akan dieliminasi. Peneliti dalam hal ini mengolah data melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi langsung terhadap pihak-pihak yang memiliki pemahaman mengenai perkembangan kelembagaan Khilafatul Muslimin dan sikap terhadap pemilu khususnya politik elektoral.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

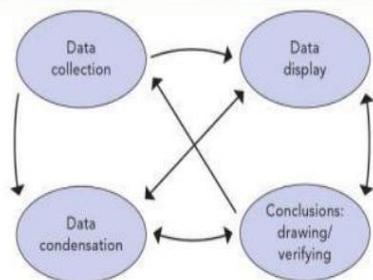
Data yang telah dikondensasi selanjutnya disusun ke dalam format yang memudahkan peneliti dalam menelaah masalah secara komprehensif. Penyajian ini bertujuan agar pola dan hubungan antar data menjadi lebih terlihat. Penyusunan informasi dilakukan dalam bentuk narasi, bagan, tabel, atau skema ringkas. Setelah seluruh data terkait sikap elektoral

kelompok Khilafatul Muslimin terkumpul, hasil observasi dan wawancara dikelompokkan untuk dianalisis secara mendalam dan dibahas secara sistematis.

4. Pengambilan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahapan akhir dalam analisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan bersifat sementara pada awalnya, kemudian diuji ulang dan diperkuat sepanjang proses analisis berlangsung. Penafsiran atas pola dan kecenderungan data dilakukan secara berulang guna memastikan validitas. Setelah proses penyajian data selesai, peneliti menyusun kesimpulan mengenai sikap organisasi Khilafatul Muslimin maupun perilaku politik para anggotanya. Hasil kesimpulan ini menjadi dasar perumusan strategi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam merespons sikap politik kelompok tersebut secara tepat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisa data terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan. Tahap-tahap tersebut dilakukan di dalam proses penelitian. Tahap tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Model Komponen Analisis Data

Sumber: Miles dan Huberman (2014)

Penelitian ini dirancang melalui proses pengumpulan, seleksi, dan reduksi data dari beragam sumber naratif yang kompleks, seperti hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumen organisasi. Analisis dilakukan secara sistematis berdasarkan tahapan-tahapan model interaktif Miles,

Huberman, dan Saldaña yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Visualisasi data menjadi bagian penting dalam mendukung proses analisis. Matriks, grafik, skema hubungan, dan bagan tematik digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun data secara terstruktur dan mengidentifikasi pola-pola temuan yang signifikan. Peneliti menekankan pentingnya menjaga kejujuran ilmiah dan integritas dalam proses penarikan kesimpulan, agar hasil yang diperoleh tidak hanya sah secara akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis sebagai rujukan strategis bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami serta merespons sikap kelembagaan dan perilaku politik anggota Khilafatul Muslimin terhadap sistem demokrasi elektoral di Indonesia.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini telah menjawab dua pertanyaan terkait perkembangan kelembagaan Khilafatul Muslimin serta sikap anggotanya terhadap demokrasi khususnya politik elektoral, dengan menggunakan pendekatan Institusionalisme Baru dan Teori Budaya Politik, yaitu :

1. Perkembangan kelembagaan Khilafatul Muslimin dapat dipahami secara komprehensif melalui lima varian utama dari Institusionalisme Baru, yaitu Institusionalisme Historis, Pilihan Rasional, Sosiologis, Konstruktivis, dan Jaringan.

Institusionalisme Historis menyoroti bahwa Khilafatul Muslimin berkembang melalui serangkaian momen historis penting, termasuk Ma'lumat pendirian tahun 1997 dan pengaruh tokoh sentral seperti Abdul Qodir Hasan Baraja. Organisasi ini menjadikan sejarah kekhalifahan sebagai referensi utama dalam membentuk struktur internal dan legitimasi institusionalnya, menunjukkan adanya jalur ketergantungan (*path dependence*) yang kuat terhadap simbol dan narasi masa lalu.

Institusionalisme Pilihan Rasional mengungkap bahwa meskipun Khilafatul Muslimin secara ideologis menolak demokrasi, secara strategis organisasi ini memilih tindakan adaptif untuk bertahan dalam sistem demokratis Indonesia. Mereka menggunakan mekanisme *principal-agent* berbasis bai'at, menerapkan aturan internal yang kuat,

serta menjalankan strategi *shadow politics* agar tetap eksis tanpa benturan langsung dengan negara.

Institusionalisme Sosiologis menekankan bahwa identitas kolektif Khilafatul Muslimin dibentuk melalui simbol, tradisi, dan internalisasi norma yang dilakukan secara sistematis. Organisasi ini tidak hanya sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai komunitas nilai yang mampu menciptakan dan memelihara makna sosial bersama. Loyalitas dan kohesi internal terjaga melalui reproduksi simbolik dan budaya organisasional yang kuat.

Institusionalisme Konstruktivis memperlihatkan bahwa institusi Khilafatul Muslimin dibentuk melalui proses diskursif dan konstruksi makna. Mereka menciptakan dunia sosial alternatif berbasis khilafah yang ditopang oleh narasi ideologis, simbol transnasional, dan praktik keagamaan yang dikonstruksikan sebagai sistem peradaban. Narasi kebangkitan Islam dari Indonesia menjadi bagian dari proyek ideologis yang ditanamkan kepada anggota melalui wacana dan tradisi kolektif.

Institusionalisme Jaringan menunjukkan bahwa Khilafatul Muslimin membentuk struktur yang kompleks dan saling terhubung lintas wilayah melalui mekanisme koordinasi sosial dan aliran informasi. Struktur hierarkis mulai dari pusat hingga kema'sulan memungkinkan organisasi mempertahankan kohesi, menyebarkan nilai, dan menjalankan kegiatan kolektif secara efektif, meskipun berada di luar sistem formal kenegaraan.

2. Sikap anggota Khilafatul Muslimin terhadap demokrasi khususnya politik elektoral mencerminkan bentuk budaya politik pasif yang tidak secara eksplisit menolak atau mendukung sistem demokrasi. Sebagian besar anggota memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilu atas dasar

keyakinan pribadi dan pemahaman ideologis bahwa kekuasaan sejatinya berasal dari Allah, bukan dari rakyat sebagaimana prinsip demokrasi.

Budaya politik yang terbentuk komunitas ini menunjukkan kecenderungan apatis politik secara institusional namun tetap berada kerangka legal negara demokrasi. Hal ini ditandai oleh tidak adanya larangan eksplisit dari organisasi terhadap partisipasi politik formal, tetapi juga tidak adanya anjuran atau pendidikan politik elektoral bagi anggotanya. Pemilu dan sistem perwakilan dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak relevan konsep kekhalifahan Islam yang mereka yakini.

Praktiknya, organisasi Khilafatul Muslimin mengembangkan logika sosial tersendiri yang membentuk sikap anggotanya terhadap negara, demokrasi, dan partisipasi politik. Konsepsi tentang pemimpin sebagai Khalifah dan sistem syura (musyawarah) menggantikan fungsi pemilu, sementara narasi tentang kebangkitan Islam melalui khilafah menjauhkan anggota dari identitas sebagai warga negara demokratis.

Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara Khilafatul Muslimin dan demokrasi di Indonesia merupakan relasi yang kompleks. Di satu sisi, terdapat penolakan simbolik dan ideologis terhadap sistem demokrasi, namun di sisi lain terdapat adaptasi strategis dan toleransi pragmatis terhadap eksistensi negara. Pola ini hanya bisa dipahami pendekatan multidimensional seperti yang ditawarkan oleh Institutionalisme Baru dan Teori Budaya Politik yang menekankan interaksi antara nilai, strategi, struktur, serta makna sosial yang dilembagakan.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah : Pemerintah perlu meningkatkan pendekatan yang bersifat dialogis dan kultural dalam merespons kelompok-kelompok yang memiliki resistensi ideologis terhadap sistem demokrasi, seperti Khilafatul Muslimin; memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam memantau serta membina organisasi yang tidak berbadan hukum secara intensif dan preventif, tanpa menimbulkan konflik terbuka; serta pemerintah agar melakukan pendekatan ekonomis dengan memperhatikan keluarga eks kelompok radikal seperti Khilafatul Muslimin khususnya tokoh yang dipenjara guna meminimalisir adanya dendam keluarga terhadap pemerintah dan memutus rantai radikalisme.
2. Bagi Penyelenggara Pemilu : KPU dan Bawaslu perlu memperluas cakupan pendidikan pemilih, khususnya ke komunitas-komunitas tertutup atau eksklusif secara ideologis. Sosialisasi partisipatif perlu dikemas secara inklusif, dengan pendekatan yang menghormati keyakinan keagamaan namun tetap menegaskan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Penyelenggara juga perlu menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat lokal yang dapat menjadi jembatan dialog antara negara dan kelompok-kelompok seperti Khilafatul Muslimin.
3. Bagi Akademisi : Peneliti bidang politik selanjutnya yang tertarik untuk menjadikan Khilafatul Muslimin sebagai objek penelitian disarankan dapat mengambil tema tentang perbandingan sistem pemerintahan antara sistem demokrasi dengan sistem khilafah.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. and Verba, S. 1965. *The Civic Culture*. Little, Brown & Company (Canada) Limited. 564 hlm.
- Anggara, S. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. CV Pustaka Setia, Banten.
- Ariyani, S. D. 2016. How does Pancasila work in countering radicalism and terrorism in Indonesia? *Jurnal Scientia Indonesia*, 2(2), 19–140. <https://doi.org/10.15294/jsi.v2i2.35970> diakses pada 8 Agustus 2024 pukul 15.06 WIB.
- Baraja, A. Q. H. 2001. *Gambaran Global Pemerintahan Islam*. Khilafatul Muslimin Press.
- Blackburn, R. 1972. *Ideology in Social Science : Readings in Critical Social Theory*. Fontana/Collins.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Burhan, B. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. PT. Prenada Media Group, Jakarta.
- Checkel, J. T. 2001. Why Comply? Social Learning and European Identity Change. *International Organization*, 55(03), 553–588.
- Creswell, J. W. and David, J. 2018. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd.*
- Darwin, M. 2012. *Anti Radikalisme dan Prospek Demokrasi*. Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1).

- Esposito, J. L. 2003. *Unholy War: Terror in the Name of Islam*. Oxford University Press.
- Fitrianto. 2015. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. Naskah Publikasi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Finnemore, M. 1996. *National Interests in International Society*. Cornell University Press.
- Graftstein, R. 1992. *Institutional Realism: Social and Political Constraints on Rational Actors*. Yale University Press.
- Hall, P. A. 1993. Policy Paradigms, Social Learning and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain. *Comparative Politics*, 25(3), 275–296.
- Hall, P. A. and Rosemary C. R. 1996. *Political Science and The Three New Institutionalisms*. MPIFG Discussion Paper.
- Hay, C. 2006. Constructivist Institutionalism. Dalam R. A. W. Rhodes, S. A. Binder, dan B. A. Rockman (Ed.), *The Oxford Handbook of Political Institutions* (hlm. 56–74). Oxford University Press.
- Hall, P. A. and Taylor, R. C. R. 1996. *Political Science and the Three New Institutionalisms*. *Political Studies*, 44(5), 936–957. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x>
- Hananda Avivah, A. H. (2023). Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)*, 3(1), 14-21.
- Harmayanti, H., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2024). Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Mawardi. *UNES Law Review*, 6(3), 8884-8901.
- Huberman, A. M., Miles, M., and Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. The United States of America: SAGE Publications.
- Humaira, A. 2012. *Konsep Negara Demokarasi*. Universitas Trisakti, Jakarta.
- Immergut, E. 1992. *Health Politics: Interests and Institutions in Western Europe*. Cambridge University Press.
- Jejen, J. 2015. Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila. *Jurnal Sositologi*, 14(2). <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2015.14.2.9>

- Juliansyah, F., Yusuf, dan Mundayat, A. A. 2019. The Government Strategy in Facing Khilafatul Muslimin Movements At Cikembar and Kebon Pedes Sukabumi. *Jurnal Peperangan Asimetris*, 51(1), 42–64.
- Kantaprawira, R. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. (Makalah). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Kenis, P., & Schneider, V. 1991. Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox. Dalam B. Marin & R. Mayntz (Ed.), *Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations* (hlm. 25–59). Campus Verlag.
- Khilafatul Muslimin. 2014. *Mengenal Khilafatul Muslimin*. Modul Internal.
- Khilafatul Muslimin. 2018. *Majalah Islam Al-Khilafah*, Edisi 67 hlm. 5. Lampung: Penerbit Khilafatul Muslimin.
- Khilafatul Muslimin. 2019. *Majalah Islam Al-Khilafah*, Edisi 71 hlm. 28-31. Lampung: Penerbit Khilafatul Muslimin.
- Kompas. 2022. *Lagi, Polda Metro Jaya Tangkap 2 Anggota Khilafatul Muslimin di Lampung*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/11/13560311/lagi-polda-metro-jaya-tangkap-2-anggota-khilafatul-muslimin-di-lampung?page=all>
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM bidang EkoSosBudKum (ekonomi, sosial, budaya, dan hukum)*, 3(2), 14-28.
- Mahoney, J. 2000. Path Dependence in Historical Sociology. *Theory and Society*, 29(4), 507–548. <https://doi.org/10.1023/A:1007113830879>
- March, J. and Olsen, J. P. 1989. *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. Free Press.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Mundzir, I. 2013. Sikap Muslim Terhadap Modernitas: Kasus Gerakan Khilafatul Muslimin di Lampung. *Jurnal Ilmu - Ilmu Keislaman Afkaruna*, 65–82. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2013>.
- Peters, B. G. 2012. *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism*. The Continuum International Publishing Group.
- Pierson, P. 1994. *Dismantling The Welfare State?* Cambridge University Press.

- Pierson, P. 2000. Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. *American Political Science Review*, 94(2), 251–267. <https://doi.org/10.2307/2586011>
- Putra, F. dan Sanusi. A. 2019. *Analisis Kebijakan Publik Neo-institusionalisme: Teori dan Praktek*. LP3ES, Jakarta.
- Pye, L. W. 1965. The Concept of Political Development. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 358 (1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/000271626535800102>
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu, Jakarta.
- Reskike, K. D. 2019. *Sistem Pemerintahan Islam Di Dunia Modern (Studi Kritis Terhadap Pandangan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung)*. (Tesis). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
- Rhodes, R. A. W. 1997. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press.
- Rhodes, R. A. W. 2007. Understanding Governance: Ten Years On. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Ridha, M.A. dan Basuki. H. 2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi XV. (Tesis). Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Roy, O. 2004. *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. Columbia University Press.
- Rozaq, A. dan Fuad, D. 2024. *The Dark Side of Kehilafatul Muslimin: Mengungkap Sisi Gelap Khilafatul Muslimin dan Misinya Mengubah Tata Pemerintahan Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ruggie, J. G. 1998. *Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization*. Routledge.
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan partai politik dalam mewujudkan demokrasi berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(02), 252-261.
- Schmidt, V. A. 2008. Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse. *Annual Review of Political Science*, 11(1), 303–326. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060606.135342>
- Scott, W. R. 2008. Approaching Adulthood: The Maturing of Institutional Theory. *Theory and Society*, 37(5), 427–442. <http://www.jstor.org/stable/40345595>

- Setiyowati, A., Putri, C. J., Jannah, F. M., & As'ad, M. R. (2021). Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib). *Yasin*, 1(2), 262–274. <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i2.132>
- Sjamsudin, N. 1993. *Dinamika Sistem Politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Steinmo, S., Thelen, K. and Longstreth, F. 1992. *Structuring Politics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511528125>.
- Studi, P., Dan, A., Islam, F., Ushuluddin, F., Filsafat, D. A. N., Islam, U., & Sunan, N. 2022. Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia dalam Perspektif Michel Foucault. *Jurnal Studi Kenegaraan*.
- Studi, P., Sekolah, P., dan Ilmu, T. 2023. Khilafatul Muslimin: Analisis tentang Deradikalisasi Diri Gerakan Fundamentalisme Indonesia. *Jurnal Keislaman*, 9(September), 177–188.
- Subkhi Mahmasani. 2020. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya (2002–2020). *Jurnal Sejarah*, 4(November), 274–282.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Taqiyuddin, A.N. 2002. *Nizām al-Hukm fī al-Islām, al-Muwassa' wa al-Munaqqah bī 'abdi al-Qadim Zallūm* (Vol. 6). HK Press.
- Thelen, K. 1999. Historical Institutionalism in Comparative Politics. *Annual Review of Political Science*, 2, 369–404. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.369>
- Wibowo, P. 2020. Sekuritisasi Wacana Khilafah Di Indonesia. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 5 (1), 25 – 49.
- Winarno, B. 2008. *Kebijakan Publik*. PT. Buku Kita, Jakarta.